

Pengaruh Dana Transfer, Belanja Modal dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2025

Nurul Farhani¹, Helmina Simanjuntak²

Universitas Asahan, Indonesia
Nurulfarahani80@gmail.com

Submitted: 14th May 2026 | **Edited:** 30th June 2026 | **Issued:** 01st October 2026

Cited on: Farhani, N., & Simanjuntak, H. (2026). Pengaruh Dana Transfer, Belanja Modal dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2025. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(4), 1393-1403.

ABSTRACT

The implementation of fiscal decentralization has increased the responsibility of local governments to manage public finances effectively. However, disparities in financial performance among local governments indicate that the effectiveness of transfer funds, capital expenditure, and budget surplus financing (SiLPA) in supporting financial performance remains inconsistent. This study aims to examine the effects of transfer funds, capital expenditure, and SiLPA on the financial performance of district and municipal governments in North Sumatra Province during the 2021–2025 period. The study employed a quantitative approach using secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance. The research covered 33 local governments observed over five years, resulting in 165 panel data observations. Data were analyzed using panel data regression, and the Fixed Effect Model was selected based on the Chow and Hausman tests as the most appropriate estimation model. The findings reveal that transfer funds have a positive and significant effect on local government financial performance, while capital expenditure has a significant negative effect. In contrast, SiLPA contributes positively to financial performance. Simultaneously, all independent variables significantly explain variations in local government financial performance. These findings provide empirical evidence regarding the determinants of regional financial performance and offer practical insights for improving fiscal management and budget allocation at the local government level.

Keywords: Fiscal Decentralization, Transfer Funds, Capital Expenditure, Silpa, Financial Performance

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya. Dalam praktiknya, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan efektivitas pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

sebagai dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Mahmudi, 2019). Di sisi lain, peningkatan kapasitas fiskal daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, belum optimalnya kualitas belanja modal, serta besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menunjukkan adanya perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola anggaran secara efektif (Hastuti & Nasution, 2024; Sugi & Mertha, 2024). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belum tentu diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan apabila pengelolaannya belum dilakukan secara optimal.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pemerintah kabupaten/kota yang relatif besar dan memiliki karakteristik fiskal yang beragam. Perbedaan kapasitas pendapatan asli daerah, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer, serta pola pengalokasian belanja modal menyebabkan capaian kinerja keuangan antardaerah tidak seragam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, beberapa pemerintah daerah masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, peningkatan belanja modal belum selalu menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik maupun kinerja keuangan, sedangkan besarnya SiLPA sering kali dipandang sebagai indikator rendahnya penyerapan anggaran, meskipun pada kondisi tertentu juga dapat mencerminkan adanya ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pada periode berikutnya (Mardiasmo, 2018; Mawardiati & Hasbi, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara dana transfer, belanja modal, SiLPA, dan kinerja keuangan pemerintah daerah masih memerlukan pengujian empiris yang lebih komprehensif.

Hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah juga menunjukkan temuan yang belum konsisten. Penelitian Dyah Ratnawati dan Putri (2023), Putra et al. (2024), Natalia dan Wendi (2024), serta Sugi dan Mertha (2024) menyimpulkan bahwa dana transfer berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, beberapa penelitian menemukan bahwa besarnya ketergantungan terhadap dana transfer justru berpotensi menurunkan tingkat kemandirian fiskal daerah apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi pendapatan daerah (OECD, 2019; World Bank, 2022). Pada variabel belanja modal, Natalia dan Wendi (2024) menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Sugi dan Mertha (2024) memperoleh hasil yang berbeda. Demikian pula pada variabel SiLPA, Halim (2008) menjelaskan bahwa SiLPA yang tinggi mencerminkan rendahnya penyerapan anggaran sehingga dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan, sementara Mawardiati dan Hasbi (2025) menemukan bahwa SiLPA justru berpengaruh positif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut, khususnya pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data panel periode 2021–2025.

Berlandaskan teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1999), pemerintah daerah akan mampu meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik apabila memiliki kewenangan fiskal yang memadai disertai pengelolaan anggaran yang efektif. Oleh karena itu, dana transfer, belanja modal, dan SiLPA dipandang sebagai instrumen fiskal yang memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena menguji ketiga variabel tersebut secara simultan menggunakan data panel terbaru tahun 2021–2025 yang mencakup seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi

Sumatera Utara. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada era pascapandemi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana transfer, belanja modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan desentralisasi fiskal, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Dalam kerangka tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan guna mencapai tujuan pembangunan secara lebih efektif. Keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima daerah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal sehingga mampu menghasilkan kinerja keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan (Kim & Dougherty, 2020; Shah, 2022). Oleh karena itu, kualitas pengelolaan dana transfer, belanja modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola seluruh sumber daya keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian terhadap kinerja keuangan umumnya dilakukan melalui analisis rasio keuangan daerah, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan keuangan. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memanfaatkan sumber pendapatan secara optimal, mengalokasikan belanja sesuai prioritas pembangunan, serta menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah (BPK RI, 2023; Kementerian Keuangan RI, 2024). Dengan demikian, peningkatan kualitas pengelolaan fiskal diharapkan mampu memperkuat kapasitas daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dana Transfer dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana transfer merupakan instrumen desentralisasi fiskal yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah sekaligus mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dana transfer terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan berbagai skema transfer lainnya yang diatur dalam kebijakan fiskal nasional. Secara teoritis, peningkatan dana transfer akan memperbesar kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga memberikan ruang yang lebih luas dalam membiayai pelayanan publik,

pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Namun demikian, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap dana transfer juga berpotensi mengurangi insentif pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran (Kim & Dougherty, 2020; Kementerian Keuangan RI, 2024). Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa dana transfer cenderung meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah apabila dikelola secara efisien dan diarahkan pada program-program yang produktif (Ritonga & Sari, 2023; Yuliana & Prasetyo, 2022).

Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Belanja ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sarana pendukung lainnya. Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, belanja modal yang tepat sasaran akan meningkatkan produktivitas aset pemerintah sehingga mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, belanja modal yang kurang efektif, tidak sesuai kebutuhan daerah, atau belum dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan beban pemeliharaan serta menurunkan efisiensi pengelolaan anggaran (BPK RI, 2023). Temuan empiris mengenai hubungan belanja modal terhadap kinerja keuangan masih menunjukkan hasil yang beragam, sehingga pengaruhnya perlu dikaji lebih lanjut pada karakteristik fiskal daerah yang berbeda (Rahman & Abdullah, 2023; Sari & Wulandari, 2021).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada akhir tahun anggaran yang menjadi sumber pembiayaan pada periode berikutnya. Besarnya SiLPA dapat mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran apabila berasal dari penghematan belanja atau peningkatan pendapatan. Namun demikian, SiLPA yang terlalu besar juga dapat mengindikasikan rendahnya penyerapan anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, atau lemahnya perencanaan anggaran. Oleh karena itu, pengaruh SiLPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah bergantung pada penyebab terbentuknya saldo anggaran tersebut. Apabila SiLPA dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung program pembangunan pada periode berikutnya, maka kondisi tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kinerja keuangan (Kementerian Keuangan RI, 2024; IFAC, 2021). Hasil penelitian terkini juga menunjukkan bahwa pengelolaan SiLPA yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah (Pramudya & Hidayat, 2022; Wijaya & Kurniawan, 2024).

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menganalisis pengaruh dana transfer (X_1), belanja modal (X_2), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (X_3) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Ketiga variabel independen diasumsikan memiliki pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen berdasarkan teori desentralisasi fiskal dan hasil penelitian terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori yang bertujuan menganalisis hubungan kausal antara dana transfer, belanja

modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Populasi penelitian meliputi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 daerah. Penelitian menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Periode pengamatan mencakup tahun 2021–2025 sehingga diperoleh 165 observasi ($33 \text{ pemerintah daerah} \times 5 \text{ tahun}$). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah (Y), sedangkan variabel independennya terdiri atas dana transfer (X_1), belanja modal (X_2), dan SiLPA (X_3). Seluruh variabel diukur menggunakan nilai realisasi yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah dan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural ($\ln$) untuk mengurangi perbedaan skala data, meningkatkan kestabilan varians, serta membantu memenuhi asumsi model regresi data panel (Gujarati et al., 2022; Wooldridge, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Pemilihan model terbaik dilakukan secara bertahap melalui Chow Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier Test. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling sesuai karena Chow Test dan Hausman Test secara konsisten mengindikasikan bahwa model efek tetap lebih mampu mengakomodasi karakteristik heterogen antar pemerintah daerah dibandingkan model lainnya. Oleh karena itu, hasil Hausman Test dijadikan dasar utama dalam penentuan model estimasi. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: $\ln KKP D = \beta_0 + \beta_1 \ln DT + \beta_2 \ln BM + \beta_3 \ln SiLPA + \varepsilon$. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model memenuhi persyaratan statistik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi ($\text{Adjusted } R^2$) untuk menjelaskan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi kinerja keuangan pemerintah daerah (Baltagi, 2021; Hill et al., 2023).

HASIL PENELITIAN

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dilakukan untuk memperoleh model estimasi yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Tiga model yang dibandingkan meliputi Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Proses pemilihan model dilakukan secara bertahap melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow digunakan untuk membandingkan CEM dengan FEM, sedangkan Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara FEM dan REM. Adapun Uji Lagrange Multiplier berfungsi sebagai pembanding antara CEM dan REM apabila hasil Uji Chow tidak mendukung penggunaan FEM (Baltagi, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000, lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, sehingga Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat dibandingkan Common Effect Model (CEM). Selanjutnya, hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0025, yang juga lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model Fixed Effect Model (FEM) merupakan model estimasi yang paling sesuai karena mampu mengakomodasi karakteristik spesifik masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang tidak dapat diamati

secara langsung. Meskipun hasil Uji Lagrange Multiplier pada Tabel 8 menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) lebih baik dibandingkan Common Effect Model (CEM), hasil tersebut tidak mengubah keputusan akhir karena secara metodologis penentuan model akhir didasarkan pada hasil Uji Hausman ketika Chow Test telah memilih FEM. Oleh karena itu, seluruh analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model estimasi utama (Wooldridge, 2021).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi terlebih dahulu dievaluasi melalui pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan menghasilkan estimasi yang bersifat tidak bias dan efisien. Pengujian meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual sebelum transformasi belum berdistribusi normal karena nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,0000. Oleh sebab itu, seluruh variabel ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) untuk memperbaiki distribusi data. Setelah transformasi, nilai probabilitas Jarque-Bera meningkat menjadi 0,122013, lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas. Transformasi logaritma juga dilakukan untuk mengurangi perbedaan skala antarvariabel dan meningkatkan kestabilan varians data sehingga model menjadi lebih representatif (Gujarati et al., 2022).

Hasil pengujian asumsi klasik lainnya menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi seluruh persyaratan statistik. Berdasarkan hasil olah data, seluruh variabel memiliki nilai Centered Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas. Selanjutnya, hasil Uji Breusch-Pagan-Godfrey menunjukkan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,5312 sebelum transformasi dan 0,1300 setelah transformasi, yang keduanya lebih besar dari 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas. Sementara itu, hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,323289 sebelum transformasi dan 1,718861 setelah transformasi. Kedua nilai tersebut berada pada kisaran yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi, sehingga model regresi memenuhi asumsi dasar untuk dilakukan pengujian hipotesis lebih lanjut (Hill et al., 2023).

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pemilihan model regresi data panel melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model estimasi akhir karena dinilai paling mampu mengakomodasi karakteristik spesifik masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1. Hasil Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.231631	2.169974	1.489249	0.1389
LOG(X1)	0.962739	0.329268	2.923875	0.0041
LOG(X2)	-0.087657	0.037831	-2.317084	0.0221
LOG(X3+1)	0.050024	0.016673	3.000306	0.0032

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Hasil estimasi pada Tabel diatas menghasilkan persamaan regresi: $\text{LnKKPD} = 3,231631 + 0,962739\text{LnDT} - 0,087657\text{LnBM} + 0,050024\text{LnSiLPA} + \varepsilon$. Nilai konstanta sebesar 3,231631 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen dianggap konstan, nilai dasar kinerja keuangan pemerintah daerah berada pada angka tersebut. Koefisien dana transfer sebesar 0,962739 mengindikasikan bahwa peningkatan dana

transfer sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,962739%, dengan asumsi variabel lain tetap. Sebaliknya, koefisien belanja modal sebesar -0,087657 menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal sebesar 1% diikuti penurunan kinerja keuangan sebesar 0,087657%. Sementara itu, koefisien SiLPA sebesar 0,050024 menunjukkan bahwa peningkatan SiLPA sebesar 1% berkorelasi dengan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,050024%.

Interpretasi koefisien tersebut menunjukkan bahwa dana transfer merupakan variabel yang memberikan kontribusi positif paling besar terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dibandingkan variabel lainnya. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh dukungan transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, koefisien negatif pada belanja modal mengisyaratkan bahwa peningkatan alokasi belanja modal belum sepenuhnya mampu menghasilkan manfaat fiskal dalam jangka pendek. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh proses pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu relatif panjang sebelum memberikan dampak terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, hubungan positif SiLPA terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa saldo anggaran lebih pada periode sebelumnya masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan yang memperkuat kapasitas fiskal daerah apabila dikelola secara efektif.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (Adjusted R²). Berdasarkan Tabel 1, variabel dana transfer memperoleh nilai probabilitas 0,0041, lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel belanja modal memiliki nilai probabilitas 0,0221, yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, variabel SiLPA memperoleh nilai probabilitas 0,0032, sehingga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, ketiga hipotesis parsial dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada masing-masing variabel independen memberikan kontribusi yang nyata terhadap perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara selama periode pengamatan.

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

R-squared	0.723923
Adjusted R-squared	0.676596
S.E. of regression	0.183999
Sum squared resid	4.739804
Log likelihood	58.74599
F-statistic	15.29604
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Hasil Olah Data, 2026

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai F-statistic sebesar 15,29604 dengan nilai probabilitas 0,000000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dana transfer, belanja modal, dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis keempat diterima.

Adapun hasil koefisien determinasi pada Tabel 2 menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0,676596, yang berarti sekitar 67,66% variasi kinerja keuangan pemerintah

daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model penelitian, sedangkan sisanya 32,34% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti Pendapatan Asli Daerah, tingkat kemandirian fiskal, ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, kualitas tata kelola, maupun karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kemampuan penjelasan yang relatif baik dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Pengaruh Dana Transfer terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Dana transfer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal, tetapi juga menjadi sumber pendanaan utama bagi sebagian besar pemerintah daerah yang masih memiliki tingkat kemandirian fiskal relatif rendah. Oleh karena itu, semakin besar dana transfer yang diterima dan dikelola secara efektif, semakin baik pula kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya.

Hasil penelitian ini mendukung teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat dapat meningkatkan efisiensi penyediaan pelayanan publik apabila diikuti dengan tata kelola keuangan yang baik (Shah, 2022). Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Natalia dan Wendi (2024), Putra et al. (2024), serta Ritonga dan Sari (2023) yang menemukan bahwa dana transfer berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada konteks Provinsi Sumatera Utara, besarnya proporsi dana transfer yang diterima pemerintah kabupaten/kota menunjukkan bahwa sumber pendanaan tersebut masih menjadi penopang utama pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, efektivitas pemanfaatan dana transfer menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada daerah yang memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja modal selama periode penelitian belum mampu secara langsung meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara empiris, kondisi tersebut dapat terjadi karena manfaat ekonomi dari belanja modal umumnya baru dirasakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang setelah aset yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan belanja modal yang tidak disertai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif berpotensi meningkatkan beban pemeliharaan aset sehingga menurunkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.

Temuan ini berbeda dengan konsep normatif pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa belanja modal merupakan investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas fiskal daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hastuti dan Nasution (2024) serta Rahman dan Abdullah (2023) yang menunjukkan bahwa besarnya belanja modal belum tentu menghasilkan peningkatan kinerja keuangan apabila realisasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan

pada kegiatan yang produktif. Pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh masih adanya pembangunan infrastruktur yang memerlukan waktu relatif panjang untuk memberikan manfaat ekonomi sehingga dampaknya terhadap indikator kinerja keuangan belum terlihat secara langsung pada periode pengamatan 2021–2025.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa SiLPA tidak selalu mencerminkan rendahnya penyerapan anggaran, tetapi juga dapat menggambarkan adanya kapasitas fiskal yang masih tersedia untuk mendukung pembiayaan program pada tahun anggaran berikutnya. Dalam kondisi tertentu, SiLPA dapat berasal dari efisiensi belanja, peningkatan realisasi pendapatan, maupun penghematan anggaran sehingga memberikan fleksibilitas fiskal bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan pandangan Halim yang menyatakan bahwa SiLPA yang tinggi cenderung mencerminkan rendahnya efektivitas pelaksanaan anggaran. Namun demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, SiLPA lebih mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal dibandingkan sebagai indikator kegagalan penyerapan anggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mawardiati dan Hasbi (2025), Wijaya dan Kurniawan (2024), serta Pramudya dan Hidayat (2022) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan SiLPA secara optimal dapat meningkatkan keberlanjutan fiskal dan memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, besarnya SiLPA perlu dianalisis berdasarkan penyebab terbentuknya, bukan hanya berdasarkan besarnya semata.

Pengaruh Dana Transfer, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa dana transfer, belanja modal, dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai Adjusted R² sebesar 67,66% menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber penerimaan daerah, kebijakan pengalokasian belanja modal, serta pengelolaan pembiayaan daerah merupakan komponen yang saling berkaitan dalam membentuk kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini memperkuat teori desentralisasi fiskal yang menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya sumber daya fiskal yang dimiliki, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan seluruh komponen anggaran secara terpadu. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putra et al. (2024) yang menyatakan bahwa kombinasi variabel fiskal mampu menjelaskan perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Dengan demikian, peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan dana transfer, tetapi juga diarahkan pada optimalisasi kualitas belanja modal serta pengelolaan SiLPA secara lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan terhadap pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya sumber daya fiskal yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif. Dana transfer terbukti masih menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota yang tingkat kemandirian fiskalnya belum optimal. Di sisi lain, pengalokasian belanja modal belum sepenuhnya mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan dalam jangka pendek, yang mengindikasikan bahwa efektivitas belanja tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, dan optimalisasi pemanfaatan aset yang dihasilkan. Selain itu, SiLPA tidak selalu mencerminkan rendahnya penyerapan anggaran, tetapi juga dapat menunjukkan adanya ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan apabila dikelola secara tepat.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik dan desentralisasi fiskal dengan menunjukkan bahwa hubungan antara instrumen fiskal dan kinerja keuangan pemerintah daerah bersifat dinamis serta dipengaruhi oleh karakteristik pengelolaan keuangan di masing-masing daerah. Hasil penelitian juga memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya transfer fiskal dari pemerintah pusat, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara seimbang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah perlu diarahkan pada penguatan efektivitas penganggaran, peningkatan akuntabilitas pengelolaan belanja modal, serta pemanfaatan SiLPA secara produktif agar mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Bagi pemerintah pusat, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan transfer ke daerah agar tidak hanya berfokus pada pemerataan fiskal, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menambahkan variabel lain seperti Pendapatan Asli Daerah, tingkat kemandirian fiskal, ukuran pemerintah daerah, maupun kualitas tata kelola pemerintahan, serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer.
- Gujarati, D. N., Porter, D. C., & Gunasekar, S. (2022). *Basic Econometrics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hastuti, S. N., & Nasution, D. (2024). Pengaruh dana transfer terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 24(2), 157-170.
- Hill, R. C., Griffiths, W. E., & Lim, G. C. (2023). *Principles of Econometrics* (6th ed.). Wiley.

- International Federation of Accountants. (2021). *International Public Sector Financial Accountability Index 2021*. IFAC.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kim, J., & Dougherty, S. (Eds.). (2020). *Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth*. OECD Publishing.
- Mawardiati, I., & Hasbi, K. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana transfer, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 686-693.
- Natalia, N., & Wendi, S. (2024). Pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan fiscal stress terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 73-86.
- OECD. (2019). *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*. OECD Publishing.
- Pramudya, R., & Hidayat, T. (2022). Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(2), 145-159.
- Putra, I. K., Rahayu, S., & Friyani, R. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(1), 516-530.
- Rahman, A., & Abdullah, M. (2023). Capital expenditure and local government financial performance: Evidence from Indonesian local governments. *Journal of Accounting and Investment*, 24(3), 421-438.
- Ritonga, P., & Sari, D. P. (2023). Pengaruh dana transfer terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(2), 276-292.
- Sari, N. M., & Wulandari, R. (2021). Belanja modal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(2), 161-174.
- Shah, A. (2022). *Fiscal Decentralization and Local Finance*. Springer.
- Sugi, L. P. M. W., & Mertha, M. (2024). Pengaruh PAD, dana transfer ke daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di wilayah Flores Provinsi NTT. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(6), 122-133.
- United Cities and Local Governments. (2022). *World Observatory on Subnational Government Finance and Investment 2022*. UCLG.
- Wijaya, H., & Kurniawan, F. (2024). Budget surplus financing and local government financial sustainability. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(1), 55-70.
- Wooldridge, J. M. (2021). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (7th ed.). Cengage Learning.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery*. World Bank.
- World Bank. (2022). *Indonesia Public Finance Review: Spending Better for Better Outcomes*. World Bank.
- Yuliana, D., & Prasetyo, E. (2022). Fiscal transfer and local government financial performance in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(4), 812-826.